



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025
PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah antara lain dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 71 Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Tertib, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi disepakati dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Ke – 8 (Delapan)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Masa Persidangan I Tahun 2024, pada tanggal 24
Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagaimana terlampir
dalam Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 24 Desember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA,



H. ACHMAD DJUFRIE, SE., MM

ASLI : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025**

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH UMUM

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyam	Ins. Pemrakarsa	Ket
			Baru	Ubah		NA	Penj/ Ket				
1	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya		Perubahan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;		Ada	Biro Perekonomian	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	

2	Raperda	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2042	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 		Ada	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
3	Raperda	Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah 			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
4	Raperda	Penanaman Modal	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 		Ada	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
5	Raperda	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	

					<p>9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 						
6	Raperda	Kesejahteraan Sosial	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 		Ada	Dinas Sosial	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
7	Raperda	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024-2033	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025 		Ada	Dinas Pariwisata	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
8	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 			Bappeda dan Litbang	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 						

					Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						
9	Raperda	Rencana Umum Energi Daerah	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah 			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
10	Raperda	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
11	Raperda	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM)	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
12	Raperda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045	Baru		- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	

					- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM)			
13	Raperda	Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah sungai Kayan	Baru		- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini berlaku sejak 7 Februari 2023.			Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM)	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
14	Raperda	Keterbukaan Informasi Publik	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 	Ada		Diskominfo	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
15	Raperda	Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Ada	Bappeda dan Litbang	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
16	Raperda	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali		Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	

					terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan						
17	Raperda	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Baru		- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif		Ada	Dinas Pariwisata	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
18	Raperda	Perlindungan Bahasa Daerah Dan Warisan Budaya Tak Benda	Baru		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;		Ada	Dinas Pariwisata	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
19	Raperda	Perbukuan dan Literasi	Baru		- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
20	Raperda	Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	Baru		- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	
21	Raperda	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Baru		- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara	2025	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

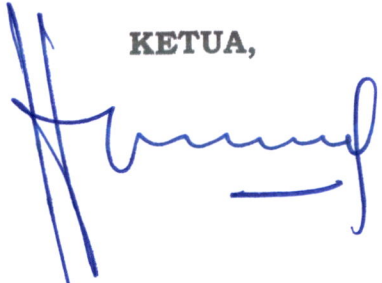
No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyamp aian	Ins. Pemrakarsa	Ket
			Baru	Ubah		NA	Penj/ Ket				
1.	Raperda	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024	Baru		<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Ada	BPKAD	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
2.	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru		<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun		Ada	BPKAD	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	

					2019. Pengelolaan Keuangan Daerah						
					- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah						
3.	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Baru		<div>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</div> <div>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</div>		Ada	BKAD	2025	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 24 Desember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA,



H. ACHMAD DJUFRIE, SE., MM